

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BERAS UNTUK KELUARGA MISKIN DI KABUPATEN SORONG

Jalmijn Tindage

Dosen Fakultas Ekonomi
Universitas Victory Sorong

***Abstract:** This study aims to determine influence implementation of rice program policies for poor families in the District Sorong. For reach aim that do data collection with use questionnaire. Respondents who used sample as many as 25 heads family in the Maliwili village, Aimas District. Results analysis show that on rice program policies can increase poor family welfare, but the effect is not very meaningful because of the calculation results, the ability to influence only the remaining 16.1% and amounted to 83.9% influenced by other variables.*

***Keywords:** rice program policies, welfare, family poor.*

PENDAHULUAN

Indonesia masih menghadapi masalah kemiskinan dan kerawanan pangan. Masalah ini menjadi perhatian nasional dan penanganannya perlu dilakukan secara terpadu melibatkan berbagai sektor baik di tingkat pusat maupun daerah. Upaya - upaya tersebut telah dicantumkan menjadi salah satu program prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2008. Pemerintah berupaya mengedepankan peran partisipasi masyarakat dengan mengacu pada teori *Bottom-Up*. Dalam hal ini pemerintah berharap masyarakat dapat terpacu untuk bisa menembus perangkap kemiskinan yang melekat pada dirinya sehingga dapat mengurangi jumlah masyarakat miskin. Salah satunya adalah dengan dicanangkannya Program Raskin. Program Raskin (Program Penyaluran Beras Untuk Keluarga Miskin) adalah sebuah program dari pemerintah. Program ini dilaksanakan di bawah tanggung jawab Departemen Dalam Negeri dan Perum Bulog sesuai dengan SKB (Surat Keputusan Bersama) Menteri Dalam Negeri dengan Direktur Utama Perum Bulog Nomor : 25 Tahun 2003 dan Nomor : PKK-12/07/2003, yang melibatkan instansi terkait, Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Program ini dimulai pada waktu terjadi krisis pangan pada tahun 1998. Untuk mengatasi krisis tersebut pemerintah mengambil kebijakan untuk memberikan subsidi

pangan bagi masyarakat melalui Operasi Pasar Khusus (OPK). Pada tahun 2002 program tersebut dilakukan lebih selektif dengan menerapkan sistem tergeting, yaitu membatasi sasaran hanya membantu kebutuhan pangan Rumah Tangga Miskin (RTM). Sejak itu program ini menjadi populer dengan sebutan Program Raskin yaitu subsidi beras bagi masyarakat miskin. Chambers (1983:109) pertama kali menggunakan konsep kemiskinan terpadu (*integrated poverty*) menilai bahwa kemiskinan yang dialami oleh rakyat negara sedang berkembang. Khususnya rakyat pedesaan, disebabkan oleh beberapa faktor yang disebut sebagai ketidakseimbangan atau *disadvantages* yang saling terkait satu sama lain. Ada lima ketidakberuntungan yang melingkupi kehidupan orang atau keluarga miskin. Kelima ketidakberuntungan adalah: (1) kemiskinan, (2) fisik yang lemah, (3) kerentanan, (4) keterisolasian dan (5) ketidakberdayaan.

Melihat tingginya angka jumlah penduduk miskin dan diperparah oleh sulitnya penduduk miskin akan akses terhadap pangan karena rendahnya daya beli sebagai akibat krisis ekonomi. Program Raskin sendiri pertama kali dilaksanakan di Kabupaten Sorong pada tahun 1994 yang masih bertitik pada tiap-tiap kecamatan yang ada di Kabupaten Sorong, dan baru pada tahun 2001 program raskin diserahkan langsung pada tiap-tiap kelurahan untuk penyaluran pada masyarakat penerima raskin, dan salah satunya adalah kelurahan Malawili Distrik Aimas yang ada di kabupaten Sorong. Dengan demikian penekanan penelitian ini pada bagaimana pengaruh implementasi kebijakan program beras (RASKIN) untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin pada Kelurahan Malawili Distrik Aimas Kabupaten Sorong.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Implementasi

Implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. Majone dan Wildavsky (dalam Nurdin dan Usman, 2002), mengemukakan implementasi sebagai evaluasi. Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. Pengertian implementasi sebagai aktivitas yang saling menyesuaikan. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Untuk mengimplementasikan sesuatu harus disertai sarana yang mendukung yang nantinya akan menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu itu. (Abdul Wahab, 1997:67). Pengertian implementasi di atas apabila dikaitkan dengan kebijakan adalah bahwa sebenarnya kebijakan itu tidak hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif seperti undang-undang dan kemudian dideklarasikan dan tidak dilaksanakan atau diimplementasikan, tetapi sebuah kebijakan dilaksanakan atau diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Proses implementasi adalah *“those*

achivemen by public or private individuals groups that are directed the achievement of objecteves set forth in prior decision” (tindakan- tindakan yang dilakukan oleh individu - individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahka pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan). Implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan saran-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu.

Hasil proses implementasi terdiri dari hasil kebijakan yang segera atau disebut sebagai *“policy performance”*. Secara konkrit antara lain dapat dilihat jumlah dan isi barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah dalam jangka waktu tertentu untuk menaikkan taraf kesejahteraan warga masyarakat, misalnya perubahan dalam taraf kesejahteraan warga masyarakat dapat dianggap sebagai hasil akhir kebijakan yang disebut juga sebagai *“policy outcome”* atau *“policy impact”*.

Pengertian Kebijakan

Kebijakan adalah aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi, yang bersifat mengikat, yang mengatur perilaku dengan tujuan untuk menciptakan tata nilai baru dalam masyarakat. Kebijakan akan menjadi rujukan utama para anggota organisasi atau anggota masyarakat dalam berperilaku. Kebijakan pada umumnya bersifat *problem solving* dan proaktif. Berbeda dengan hukum (*law*) dan peraturan (*regulation*), kebijakan lebih bersifat adaptif dan intepratatif, meskipun kebijakan juga mengatur “apa yang boleh, dan apa yang tidak boleh”. Kebijakan juga diharapkan dapat bersifat umum tetapi tanpa menghilangkan ciri lokal yang spesifik. Kebijakan harus memberi peluang diinterpretasikan sesuai kondisi spesifik yang ada. Beberapa orang menyebut *policy* dalam sebutan “kebijaksanaan”, yang maknanya sangat berbeda dengan kebijakan. Istilah kebijaksanaan adalah kearifan yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan kebijakan adalah aturan tertulis hasil keputusan formal organisasi. Contoh kebijakan adalah: (1) Undang-Undang, (2) Peraturan Pemerintah, (3) Keppres, (4) Kepmen, (5) Perda, (6) Keputusan Bupati, dan (7) Keputusan Direktur. Setiap kebijakan yang dicontohkan di sini adalah bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan oleh obyek kebijakan.

Badjuri, Aulkahar dan Yuwono (2003:132) evaluasi kebijakan merupakan salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan. Pada umumnya evaluasi kebijakan dilakukan setelah kebijakan publik tersebut diimplementasikan. Ini tentunya dalam rangka menguji tingkat kegagalan dan keberhasilan, keefektifan dan keefisienanya.

Analisis Kebijakan

Analisis kebijakan merupakan penelitian sosial terapan yang secara sistematis disusun dalam rangka mengetahui substansi dari kebijakan agar dapat diketahui secara

jelas informasi mengenai masalah-masalah yang dijawab oleh kebijakan dan masalah-masalah yang mungkin timbul sebagai akibat dari penerapan kebijakan. Ruang lingkup dan metode analisis kebijakan umumnya bersifat deskriptif dan faktual mengenai sebab-sebab dan akibat-akibat suatu kebijakan. Penelitian kebijakan sedapat mungkin melihat berbagai aspek dari kebijakan agar dapat menghasilkan informasi yang lengkap. Informasi mengenai masalah-masalah yang dijawab oleh kebijakan serta masalah-masalah yang ditimbulkan dari penerapan kebijakan menjadi fokus dari analisis kebijakan.

Pengertian Pengawasan

Pengawasan, tujuan pengawasan pada kesempatan ini dibahas mengenai pengertian pengawasan dan tujuan pengawasan. Tentu kita bertanya apakah itu pengawasan dan apa itu tujuan pengawasan. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka di bawah ini akan dibahas mengenai pengawasan dan tujuan pengawasan secara terperinci. Dengan pengawasan diketahui sampai dimana penyimpangan, penyalahgunaan, kebocoran, pemborosan, penyelewengan, dan lain-lain. Jadi keseluruhan dari pengawasan adalah kegiatan membandingkan apa yang sedang atau sudah dikerjakan dengan apa yang direncanakan sebelumnya, karena itu perlu kriteria, norma, standar dan ukuran tentang hasil yang ingin dicapai. Dari pengertian pengawasan diatas, terdapat hubungan yang erat antara pengawasan dan perencanaan. Karena pengawasan dianggap sebagai aktivitas untuk menemukan, mengoreksi penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan dan hasil yang dicapai dari aktivitas-aktivitas yang direncanakan.

Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan bisa dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut mengacu pada satu set standard yang konsisten, tidak terpengaruh oleh waktu dan tempat/negara. Sebuah contoh dari pengukuran absolut adalah persentase dari populasi yang makan di bawah jumlah yang cukup menopang kebutuhan tubuh manusia (kira-kira 2000 - 2500 kalori per hari untuk laki laki dewasa).

METODE

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Malawili Distrik Aimas Kabupaten Sorong dengan sampel 25 KK. Variabel utama terdiri dari kebijakan program beras keluarga miskin sebagai variabel independen (X) dan kesejahteraan keluarga miskin sebagai variabel dependen (Y). Indikator variabel independen terdiri dari akuntabilitas terhadap implementasi kebijakan, kredibilitas pengawasan, pangkalan data. Sedangkan untuk variabel dependen implementasi untuk masyarakat miskin, mencegah pemborosan dan penyelewengan, struktur sosial keluarga miskin. Data primer maupun data sekunder dari lokasi penelitian dengan mengadakan observasi dan interview. Setiap jawaban memiliki bobot tertentu sesuai Skala Likert sebagai berikut: (a) responden yang memiliki kategori jawaban “a” diberi nilai “4”, (b) responden yang memiliki kategori jawaban “b” diberi nilai “3”, (c) responden yang memiliki kategori jawaban “c” diberi nilai “2”, (d) responden yang memiliki kategori jawaban “d” diberi nilai “1”. Data yang dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan regresi linier sederhana

HASIL DAN PEMBAHASAN

Permasalahan yang dihadapi adalah implementasi kebijakan program beras untuk keluarga miskin (RASKIN) pada Kelurahan Malawili Distrik Aimas Kabupaten Sorong. Untuk mempermudah pembahasan maka permasalahan tersebut dapat dirumuskan secara baik dan kemudian dicarikan jalan keluar melalui penelitian. Data yang diperoleh dari hasil penelitian, kemudian ditabulasi sebagai persiapan untuk melakukan perhitungan sesuai metode analisis yang digunakan.

Tabel 1
Persiapan Uji Regresi

No. Resp.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Variabel X	8	7	6	7	9	6	6	8	6	10	7	8	8	8	7	6	7	6	6	6	7	8	7	6	6
Variabel Y	6	8	6	8	6	7	7	7	6	7	6	6	6	7	6	8	7	7	6	6	6	6	6	6	6

Sumber : hasil penelitian, data diolah.

Data pada tabel 1 diolah selanjutnya dengan menggunakan paket program SPSS diperoleh nilai masing-masing variabel sebagai berikut:

Tabel 2
Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana

Variabel	Koefisien Regresi	t-hitung	Sig.
Kostanta	5,039	3,352	0,003
X (kebijakan program RASKIN)	0,443	2,101	0,047
Korelasi (R)	0,401		
R Square (R ²)	0,161		

Sumber : tabel 1, data diolah.

Informasi yang diperoleh dari perhitungan di atas adalah: *pertama*, koefisien regresi $b = 0,443$ menunjukkan arah positif yang artinya jika kebijakan program beras keluarga miskin diimplementasikan dengan baik, maka akan meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin tersebut. *Kedua*,

Nilai sig. variabel bebas X sebesar 0,047 menunjukkan bahwa probabilitas signifikansi lebih kecil dari $\alpha = 5\%$ atau 0,05 menunjukkan bahwa pengaruh positif yang ditunjukkan oleh koefisien regresi kebijakan program RASKIN signifikan atau nyata dalam mempengaruhi peningkatan kesejahteraan keluarga miskin. *Ketiga*, nilai R atau koefisien korelasi sebesar 0,401 menunjukkan ada hubungan positif antara implementasi kebijakan dengan kesejahteraan keluarga miskin, artinya bahwa apabila terjadi peningkatan sebesar, 0,401 pada variabel bebas yaitu implementasi kebijakan, maka peningkatan yang sama akan terjadi pada variabel bebas yaitu kesejahteraan keluarga miskin, dan sebaliknya apabila terjadi penurunan sebesar 0,401 pada variabel bebas yaitu implementasi kebijakan maka penurunan yang sama akan terjadi pada variabel terikat yaitu kesejahteraan keluarga. *Keempat*, R-Square (R²) sebesar 0,161 atau sebesar 16,1% dan setelah diadakan penyesuaian (*adjusted* R²) menjadi sebesar 0,125 menunjukkan bahwa variabel X (kebijakan program RASKIN) dapat menjelaskan variasi atau perubahan variabel terkait Y (kesejahteraan keluarga miskin karier) sebesar 16,1% sedangkan sisanya sebesar 83,9% disebabkan oleh faktor lain di luar variabel kebijakan program RASKIN.

KESIMPULAN DAN SARAN

Mencermati uraian di atas maka dapat dipastikan bahwa secara nyata kebijakan program RASKIN dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin, tetapi pengaruh tersebut tidak terlalu berarti karena dari hasil perhitungan, kemampuan pengaruhnya hanya 16,1% dan selebihnya dipengaruhi oleh variabel lain, atau bisa dikatakan bahwa

implementasi kebijakan terhadap program RASKIN bagi keluarga miskin dapat dilihat kurang berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Beberapa saran yang dikemukakan sesuai dengan kesimpulan di atas: *pertama*, diharapkan Kantor Kelurahan Malawili Disrtik Aimas adalah Sebagai kantor kelurahan mengutamakan pelayanan masyarakat, dengan meningkatkan kinerja pada program raskin untuk keluarga miskin. *Kedua*, penerapan fungsi operasional terhadap implementasi kebijakan progaram raskin yang tepat pada kantor kelurahan Malawili perlu diperhatikan dan disesuaikan dengan metode-metode penerapan pelayanan yang baik bagi masyarakat. *Ketiga*, implementasi kebijakan dapat meningkat sesuai yang diharapkan apabila memperhatikan; (a) akuntabilitas terhadap implementasi kebijakan, (b) meningkatkan kredibilitas pengawasan, (c) pangkalan data.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrew F. Sikula (2005), *Manajemen Operasional*, Penerbit PT. Gunung Agung, Jakarta.
- Abdul Wahab, 1997:67, *Kinerja Dalam Manajemen*, Jakarta.
- Badjuri, Aulkahar dan Yuwono (2003:132), *Evaluasi Kebijakan Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi Pertama, BPFE, Jakarta.
- Bambang Sunggono (1994 : 139). *Perilaku Organisasi*, Edisi Ke Sepuluh, Jakarta.
- Bryant dan White (1989:32), *Kepemimpinan Administratif*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Gibson (1996 : 126) *Perilaku Dalam Pengendalian Kerja*, Edisi Pertama, Jakarta
- Nurdin dan Usman, 2002. *Penilaian Implementasi Manajemen*, Penerbit Angkasa Persada, Bandung.
- Peraturan-Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000, Tentang *Syarat-Syarat Pegawai Negeri Sipil*.
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 199, Tentang *Peraturan Pegawai Negeri Sipil*.
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang *Kewajiban Pegawai Negeri Sipil*.